

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Bab V merupakan bagian pembahasan yang mendiskusikan temuan penelitian pada bab IV dengan analisis teori maupun penelitian terdahulu. Analisis teori digunakan untuk mengonstruksi konsep berdasar informasi empiris. Hasil rekonstruksi konsep tersebut disusun dalam proposisi sebagai temuan teoritikal substantif dan praktis<sup>1</sup>. Pada bab pembahasan ini akan dipaparkan secara berurutan mengenai, 1) identitas sosial *mad'u* dakwah moderasi beragama di YouTube; 2) identitas ideologi keagamaan *mad'u* dakwah moderasi beragama di YouTube; dan 3) relasi kuasa identitas sosial dan identitas ideologi keagamaan *mad'u* terhadap dakwah moderasi beragama di YouTube.

#### **A. Identitas Sosial *Mad'u* Dakwah Moderasi Beragama di YouTube**

Menyebarkan agama kepada umat yang belum beragama dan membina umat untuk beragama lebih baik merupakan salah satu tujuan dakwah selain tujuan-tujuan lainnya. Pada dasarnya dakwah moderasi beragama bertujuan mengajak semua umat manusia untuk melaksanakan praktik kegamaannya secara adil dan seimbang. Dengan demikian dakwah moderasi beragama bertujuan sama dengan dakwah-dakwah sebagaimana mestinya. Namun demikian, dakwah moderasi beragama yang disampaikan melalui *platform* YouTube berbeda dengan dakwah moderasi beragama yang disampaikan secara langsung. Kalaupun dakwah

---

<sup>1</sup> B.G Glasser & A.L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory Strategies for Research*, (Chicago: Aldine Publishing Company, 1974), 151

secara langsung lebih mudah mengidentifikasi identitas *mad'u*-nya, tetapi mengidentifikasi *mad'u* dakwah tidak langsung bukan hal yang mudah.

Mengidentifikasi identitas *mad'u* penting dilakukan karena sebagai salah satu indikator keberhasilan dakwah. Demikian pula dalam mengidentifikasi *mad'u* dakwah moderasi beragama di YouTube. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan identitas sosial dan ideologi kegamaan *mad'u*, pembahasannya disampaikan berikut ini.

### **1. Identitas agama *mad'u* dakwah moderasi beragama Aswaja di YouTube**

Dakwah moderasi beragama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam di Indonesia. Mengapa umat Islam? Karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam meskipun dalam praktiknya, tidak hanya umat Islam yang menerima dakwah moderasi beragama. Hal tersebut sebagaimana hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti terhadap komentar 6 video dakwah moderasi beragama di YouTube. Peneliti menemukan 5 agama yang dipeluk oleh *mad'u*, yaitu Islam, Kristen-Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. *Mad'u* beragama Katolik tidak terdapat dalam dakwah moderasi beragama di YouTube ini. Selain itu, terdapat *mad'u* yang menyatakan tidak beragama (agnostik).

Kelima agama tersebut diakui secara sah di Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam data KTP atau identitas lainnya (Pasal 61 dan 64 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Pengakuan secara undang-undang terhadap kelima agama tersebut menunjukkan bahwa Indonesia negara

berketuhanan. Dari 628 komentar *mad'u* yang menyebutkan agamanya non-Muslim, 31 orang. Dengan demikian, terdapat  $\pm 99,99\%$  *mad'u* yang beragama Islam dalam dakwah moderasi beragama di YouTube. Identitas agama tersebut disampaikan oleh *mad'u* secara langsung dan tidak langsung. Pelabelan secara kategoris agama *mad'u* hanya dilakukan oleh *mad'u* beragama selain Islam dan agnostik.<sup>2</sup> Namun pelabelan identitas sosial *mad'u* tidak hanya dilakukan dengan kategori, pelabelannya dilakukan melalui nama *mad'u* dan ungkapan keagamaannya.

Meskipun dakwah moderasi beragama tersebut disampaikan oleh dai yang beragama Islam; konsep moderasi beragama berdasarkan agama Islam; dan ditujukan kepada umat Islam, para *mad'u* yang beragama selain Islam menyatakan persetujuan dan penerimaan terhadap moderasi beragama yang disampaikan oleh para dai. Hal tersebut menunjukkan bahwa dakwah moderasi beragama di YouTube yang disampaikan oleh para dai diperuntukkan bagi seluruh alam (Rahmatan lil 'alamin) dan tidak disertai kekerasan menjadi daya tarik bagi *mad'u* yang beragama selain muslim untuk mengikutinya.<sup>3</sup> Adapun *mad'u* yang beragama Islam ada yang menerima konsep moderasi beragama dan ada pula yang menolaknya.

Penolakan moderasi beragama di YouTube oleh *mad'u* yang beragama Islam didasari dengan berbagai argumen yang dilatarbelakangi oleh kehidupan

---

<sup>2</sup> Edy Suhardono, Audifax, *Membaca Identitas Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas: Suatu Tinjauan Filsafat dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2023), hlm. 53-54, [https://books.google.com/books/about/Membaca\\_Identitas\\_Multirealitas\\_dan\\_Rein.html?id=as7bEAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Membaca_Identitas_Multirealitas_dan_Rein.html?id=as7bEAAAQBAJ)

<sup>3</sup> Masadar Hilmy, "QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 36, Nomor 2 (2012), <https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/127/141>

keagamaan, politik dan ideologi. Argumen penolakan tersebut antara *mad'u* yang satu dengan yang lain memiliki kemiripan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka berada dalam satu kelompok keagamaan dan dalam golongan antipati.<sup>4</sup>

Identitas keagamaan seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman apalagi akibat interaksi dalam ruang digital. Adapun keberadaan *mad'u* agnostik dalam dakwah moderasi beragama di YouTube menunjukkan adanya fenomena baru yang secara terang-terangan diungkapkan. Hal tersebut tidak mungkin terjadi pada dakwah yang dilaksanakan secara langsung. Ruang digital menjadikan seseorang bebas menyampaikan sesuatu walaupun berkaitan dengan kehidupan keagamaannya.

Dakwah moderasi beragama di YouTube yang disetujui oleh *mad'u* yang beragama selain Islam menunjukkan bahwa konflik keberagaman di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh sesama penganut agama Islam dari pada antarumat beragama. Kalaupun terjadi konflik antarumat beragama biasanya terjadi pada tingkatan di bawah. Dakwah moderasi beragama merupakan ajakan, seruan kepada manusia untuk menjalani kehidupan beragamanya dengan benar agar tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrem dan adil. Tidak ada batasan bahwa moderasi beragama diperuntukkan kepada umat tertentu dengan agama tertentu, melainkan untuk semua manusia.<sup>5</sup> Tidak ada larangan bagi siapa pun untuk mendengar ceramah dakwah moderasi beragama di YouTube, tetapi kalau akhirnya berkonflik antar *mad'u* lebih baik dihindari supaya tidak berdampak buruk. Hal tersebut dapat dilihat pada komentar-komentar *mad'u* yang tidak menanggapi

---

<sup>4</sup> Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, hlm.66-69

<sup>5</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, ( Jakarta: Kemenetrian Agama RI,2019), 2-5

pernyataan-pernyataan berkonflik yang memojokkan pemerintah, membandingkan kelompoknya lebih baik dari kelompok lain, dan sebagainya. *Mad'u* yang lebih banyak diam dan tidak berkonflik termasuk dalam kelompok Islam moderat karena memiliki prinsip netral (*tawazun*) yaitu seimbang dalam dunia politik (tidak menyetujui tindakan kelompok yang merongrong pemerintah).<sup>6</sup>

## 2. Identitas jenis kelamin *mad'u* dakwah moderasi beragama di YouTube

Sebagaimana data kewarganegaraan, jenis kelamin merupakan identitas yang melekat pada setiap warga negara. Secara demografis jenis kelamin memegang peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik. Demikian pula dalam ranah agama. Dalam ranah tersebut jenis kelamin dapat memberi dimensi khusus dalam pesan agama yang disampaikan, dipahami, dan diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Dakwah merupakan ranah agama yang memiliki dimensi khusus dalam melibatkan jenis kelamin *mad'u*. Mengidentifikasi jenis kelamin dalam dakwah memungkinkan seorang dai akan lebih efektif dalam menyampaikan pesannya, terutama dalam dakwah secara langsung. Namun tidak demikian yang terjadi dalam dakwah tidak langsung. Identitas jenis kelamin *mad'u* tidak dapat diprediksi sebelumnya (maksudnya apakah *mad'u* perempuan atau *mad'u* laki-laki yang akan mengikuti dakwah moderasi bergama melalui YouTube.

*Mad'u* dakwah moderasi agama di YouTube sesuai dengan pembagian jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dengan jumlah terbanyak *mad'u* laki-laki.

---

<sup>6</sup> Mizaj Iskandar, *Sunni dan Wahabi: Mencari Titik Temu dan Seteru*, (Banda Aceh: Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2018), hlm. 6-23. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24679/1/1.%20Buku%20Sunni%20dan%20Wahabi.pdf>.

Perbedaan jumlah bukan menjadi faktor utama dalam penentuan keberhasilan dakwah karena tidak ada larangan menerima atau memberikan dakwah didasarkan pada jenis kelamin. Jenis kelamin *mad'u* yang mengomentari dakwah moderasi beragama Adi YouTube tidak bisa dilihat secara langsung sebagaimana dakwah yang dilaksanakan secara langsung. Namun demikian, berdasarkan pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui jenis kelamin *mad'u*, yakni laki-laki dan perempuan. Jumlah di antara keduanya lebih banyak laki-laki. Pembagian identitas *mad'u* berdasarkan jenis kelamin menurut Al 'Amusy dalam Asy Syakir menyatakan bahwa pembagian tersebut didasarkan pada *ashnaf mad'u*.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Faizah dalam Irhamdi menyebutkan bahwa penggolongan *mad'u* yang didasarkan pada jenis kelamin merupakan salah satu dari 9 pembagian penggolongan *mad'u*.<sup>8</sup>

*Mad'u* berdasarkan identitas jenis kelamin ini juga menyampaikan penolakan dan penerimaan terhadap konsep moderasi beragama. Aggapan bahwa selama ini perempuan selalu menjadi mahluk penurut tidak berlaku dalam dakwah moderasi beragama. Komentar *mad'u* perempuan tidak kalah dalam berargumen menentang konsep beragama. Demikian pula *mad'u* perempuan yang menyetujui moderasi beragama.

### 3. Identitas status sosial *mad'u* dakwah moderasi beragama di YouTube

Selain agama dan jenis kelamin status sosial juga termasuk identitas seseorang. *Mad'u* yang mengomentari dakwah moderasi agama di Youtube

<sup>7</sup> [https://www.academia.edu/download/45916245/Al\\_Madu\\_Objek\\_Dakwah.pdf](https://www.academia.edu/download/45916245/Al_Madu_Objek_Dakwah.pdf)

<sup>8</sup> Muhamad Irhamdi, Keberagaman *Mad'u* sebagai Objek Kajian Manajemen Dakwah: Analisis dalam Menentukan Metode, Strategi, dan Efek Dakwah, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/1711>

memiliki berbagai status sosial. Status sosial *mad'u* ada yang disampaikan dalam komentar ada pula yang tidak. Status sosial para *mad'u* antara lain: santri, pelajar, mahasiswa, guru, penyuluh agama, ibu rumah tangga, kreator, ASN, karyawan swasta, masyarakat, polisi, youtuber, dan petani. Peneliti perlu mengetahui status sosial para *mad'u* karena apa yang disampaikan *mad'u* berhubungan dengan ide, gagasan, dan pengetahuannya tentang moderasi beragama.

Identitas sosial *mad'u* berperan penting dalam rangka mewujudkan keberhasilan dakwah karena akan berdampak luas terhadap keefektifan dan penerimaan dakwah. Identitas sosial berkaitan dengan cara seseorang mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks kelompok sosial tertentu, yang dapat mencakup agama, etnis, budaya, atau afiliasi komunitas lainnya. Dalam manajemen dakwah mengetahui identitas sosial *mad'u* sangat penting karena berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi dakwah. Hal tersebut dilakukan karena untuk menentukan tema yang berkaitan dengan problema *mad'u* sebagai penerima dakwah. Di samping itu, dengan mengetahui identitas psikologis, jenjang pendidikan, dan strata sosial *mad'u* akan mudah bagi dai untuk menentukan bahasa yang akan digunakan untuk berdakwah.<sup>9</sup>

Dengan mengetahui identitas sosial *mad'u*, dakwah moderasi beragama, akan tepat sasaran. Misalnya, dakwah kepada *mad'u* yang berstatus sosial mahasiswa akan banyak manfaat bagi negara karena semakin banyak mahasiswa yang terlibat dan paham tentang penguatan keberagaman yang moderat dapat

---

<sup>9</sup> Ibid., Irhamdi...

mengurangi kecenderungan sikap dan gerakan eksklusivitas beragama para pemuda khususnya generasi milenial. Kerentanan pemuda terhadap sikap dan gerakan tersebut dipicu oleh beberapa hal, salah satunya kemudahan dalam memperoleh informasi tentang narasi-narasi keagamaan melalui media digital.<sup>10</sup> Dengan demikian, tindakan yang sudah diambil oleh Kementerian Agama melakukan sosialisasi tentang moderasi beragama melalui *platform* YouTube sudah sangat tepat dan benar namun baik secara kualitas dan kuantitas masih kurang. Sudah seharusnya otoritas keagamaan para ulama di ruang digital ditambah dan diaktifkan untuk menyuarakan sikap dan pandangan beragama yang moderat.

Di samping itu, keikutsertaan berbagai kementerian dalam penguatan moderasi beragama sangat diharapkan terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian tersebut juga punya andil dalam melahirkan pemuda yang berpaham radikal sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sirry. Berdasarkan penelitiannya pada 7 perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya keterlibatan mahasiswnya dalam gerakan garis keras.<sup>11</sup> Kementerian Agama yang memiliki badan khusus yang membidangi SDM dan penguatan sikap moderasi beragama sudah sesuai namun kurang tepat kalau hanya dilakukan secara luring. Karena pelaksanaan diklat secara luring memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sasaran kurang menyeluruh dan merata. Mahasiswa atau

---

<sup>10</sup> Wildan Hefni, Muhamad Khusnul Muna, Pengarusutamaan Moderasi Beragama Generasi Milenial melalui Gerakan Siswa Moderat di Kabupaten Lumajang, *Jurnal SMART* (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi), Vol. 08, Nomor 02, Desember 2022. <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/1763>

<sup>11</sup> Mun'im Sirry, Muslim Student Radicalism and Self-Deradicalization in Indonesia, *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 31, Issue 2. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09596410.2020.1770665>



pemuda sebagai sasaran yang tepat selayaknya diberi ruang khusus untuk penguatan moderasi beragama terutama di ruang digital.

#### 4. Identitas asal *mad'u* dakwah moderasi beragama di Youtube

Mengetahui asal *mad'u* sangat penting dalam berdakwah karena dapat digunakan sebagai pertimbangan dai dalam menyampaikan materi dakwah. Dengan mengetahui asal *mad'u*, dai dapat menyesuaikan bahasa dan media apa yang digunakan dalam berdakwah. Adapun *mad'u* dakwah moderasi beragama Aswaja di Youtube berasal dari dalam maupun luar negeri. Karena dakwah moderasi beragama ini disampaikan di *platform* YouTube, asal *mad'u* tidak dapat dibatasi oleh letak geografis. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kecanggihan teknologi dakwah dapat diakses oleh siapa pun, dimana pun dan kapan pun. Demikian halnya dengan dakwah moderasi beragama. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Murniaty Sirajuddin bahwa kecanggihan teknologi telah membuka sekat dan menghilangkan batas ruang dan waktu dalam berdakwah.<sup>12</sup> Dengan mengetahui asal *mad'u* dakwah moderasi agama di YouTube yang berasal dari dalam dan luar negeri (melampaui batas dangeografi),<sup>13</sup> menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya dibutuhkan oleh *mad'u* yang berasal dari Indonesia.

Dakwah moderasi beragama merupakan salah satu tema dakwah di samping tema-tema yang lain. Meskipun konsep moderasi bergama belum sepenuhnya

---

<sup>12</sup> Murniaty Sirajuddin, "Pengembangan Strategi Dakwah melalui Media Internet (Peluang dan Tantangan)", *Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Volume 1, Nomor 1 Desember 2014, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\\_Al-Nafs/article/view/2550](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/2550)

<sup>13</sup> Ngainun Naim, Abad Badruzaman, Pesantren, Kampus Islam, dan Moderasi Beragama, (Tulungagung: Akademia Pusaka, 2024), hlm. 3.

diterima oleh masyarakat Indonesia, dakwah ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Tantangan Indonesia ke depan lebih berat dan kompleks dalam menghadapi berbagai permasalahan terutama dalam praktik keagamaan. Kemudahan dan kecanggihan teknologi berpengaruh besar terhadap pemahaman nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh individu serta paham-paham yang muncul akibat kecanggihan teknologi tersebut. Dakwah moderasi beragama dapat disampaikan dengan berbagai *platform* dengan mempertimbangkan identitas sosial *mad'u*.

### **B. Identitas Ideologi Keagamaan *Mad'u* Dakwah Moderasi Beragama di YouTube**

Sebagaimana diketahui bahwa moderasi beragama menjadi program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada 2019 sebagai upaya untuk mengurangi berbagai konflik keagamaan dan sosial di Indonesia. Moderasi beragama sebagai program pemerintah telah berjalan selama 5 tahun dan setidaknya program tersebut telah berhasil menanamkan konsep hidup secara moderat dengan pengimplementasiannya bagi masyarakat Indonesia. Bahkan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Bagian ke-11 Pasal 34-36 yang mengatur tentang program tersebut dan sampai saat ini terus dijalankan dengan berbagai kegiatan (sosialisasi, pelatihan dan pendidikan, penelitian, dakwah dengan berbagai media dan sebagainya).

Berkaitan dengan dakwah moderasi beragama di media digital (YouTube), terdapat penelitian yang hasilnya sangat mengejutkan. Salah satu hasil penelitian 2023 tentang dakwah moderasi beragama secara digital bukan saja berdampak

positif, tetapi memunculkan rasa intoleran antarsesama umat beragama dan menurunkan kesadaran moderasi beragama.<sup>14</sup> Demikian pula dengan penelitian ini, rakyat Indonesia (*mad'u* dalam dakwah moderasi beragama Aswaja di YouTube) belum semuanya menerima dakwah tersebut meskipun ada pula yang menyetujuinya. Sikap menyetujui dan menolak program moderasi beragama oleh para *mad'u* tersebut berkaitan dengan ideologi keagamaan yang dianutnya.

Sebelum pembahasan secara khusus tentang identitas ideologi keagamaan *mad'u* dakwah moderasi agama di YouTube, peneliti perlu menyampaikan hasil analisis data yang berbentuk kosakata yang berkaitan dengan ide, gagasan, pola pikir para *mad'u* tentang moderasi beragama. Dari berbagai komentar para *mad'u* yang dapat menerima program moderasi beragama menyatakan bahwa istilah moderasi beragama berfungsi sebagai sikap, tindakan, filter, bagi kehidupan bergama di Indonesia agar terhindar dari berbagai paham atau ideologi ekstrim, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta jalan penghubung antara cinta agama dan negara. Di samping itu, terdapat beberapa pendapat yang cenderung dan ekstrem dalam memaknai moderasi beragama seperti proyek liberalisasi agama, program *think tank/rand corp* Amerika, berjualan agama, adaptasi JIL dan Islam Nusantara dsb. Untuk itu, peneliti menelusuri referensi terkait pandangan-pandangan tersebut.

Didapatkan dari salah satu sumber media massa<sup>15</sup> bahwa pendapat para *mad'u* yang menyatakan bahwa program moderasi beragama di Indonesia

---

<sup>14</sup>Akbar Rizquni Mubarak, Sunarto Sunarto, "Moderasi Beragama di Era Digital:Tantangan dan Peluang", *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)*, Volume 2,Nomor1, Januari 2024, 1-11, DOI: <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.1-11>

<sup>15</sup> <https://theglobal-review.com/jurus-sakti-pecah-belah-sesama-kelompok-islam-ala-rand-corporation/>

merupakan salah satu strategi implementasi dari *Rand Corporation* (selanjutnya disingkat RC) adalah pendapat dari beberapa kelompok tertentu di Indonesia. Hendrajit dalam “*Global Review*” menyampaikan bahwa *Rand Corporation* adalah Pusat Penelitian dan Kajian Strategis tentang Islam di Timur Tengah yang dibiayai oleh *Smith Richardson Foundation* yang berpusat di Santa Monica-California dan Arlington-Virginia, Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang kedirgantaraan dan persenjataan yang selanjutnya berubah menjadi lembaga *think tank* (dapur pemikiran). Salah satu isi dokumen RC yang perlu mendapat perhatian serius adalah tentang tajuk *Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies*. Menurut Hendrajit salah satu agenda tajuk tersebut adalah memetakan kekuatan dan kelemahan potensi-potensi kekuatan Islam di negara-negara berkembang yang hasilnya akan digunakan untuk membangun strategi dalam melemahkan dan memecah belah kekuatan-kekuatan umat Islam.

Berita-berita media massa lain yang memuat pernyataan senada dengan Hendrajit antara lain al Wa’ie<sup>16</sup> yang secara khusus memuat tentang RC dengan tajuk “Strategi *RAND Corporation* dalam Menghalangi Pendirian Kembali *Khilafah*”. Media Massa Suara Nasional dengan tajuk “Ini Cara *Rand Corporation* Adu Domba Sesama Kelompok Islam.”<sup>17</sup> merupakan tulisan Hendrajit yang isinya lebih detil. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam berbagai media massa tersebut apa yang disampaikan oleh para *mad’u* tentang

---

<sup>16</sup> <https://alwaie.net/dunia-islam/strategi-rand-corporation-dalam-menghalangi-pendirian-kembali-khilafah/>

<sup>17</sup> <https://suaranasional.com/2018/10/28/ini-cara-rand-corporation-adu-domba-sesama-kelompok-islam/>

program moderasi beragama merupakan implementasi strategi RC mengindisikan bahwa mereka berideologi Wahabi. Hal tersebut sebagaimana disebutkan bahwa salah satu ciri kelompok Wahabi adalah akan menegakkan syariat *khilafah*, anti terhadap Amerika Serikat, mengalihkan isu-isu permasalahan-permasalahan sosial, dan sering menggunakan kata *kaffah*.<sup>18</sup>

Selanjutnya terdapat pandangan *mad'u* yang menyatakan bahwa moderasi beragama merupakan sinonim Islam Nusantara (selanjutnya disingkat IN), Jaringan Islam Liberal (JIL), Liberalisme, Sinkretisme, dan Sekulerisme. Gagasan memunculkan istilah IN di Indonesia memang menuai pendapat pro dan kontra. Awal kemunculan istilah IN merupakan sebuah gagasan untuk mendialektikan Islam dengan kebudayaan Nusantara. Untuk menanggapi sikap pro dan kontra terhadap istilah tersebut, berbagai pendapat dihadirkan dalam memaknai istilah IN sehingga pendapat tersebut dapat menjadi referensi bagi pihak yang pro maupun kontra.<sup>19</sup> Penyamaan moderasi beragama dengan Islam Nusantara oleh para *mad'u* tersebut bukan tanpa dasar. IN sangat dekat dengan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) sehingga orang yang tidak sepaham dengan NU mencari celah bagaimana menentang konsep-konsep yang dikemukakan NU di Indonesia. Apalagi sejak awal berdiri, visi NU sudah menegaskan bahwa organisasinya bukan berjalan di arena politik namun suatu sikap untuk menentang adanya penafsiran terhadap agama Islam

---

<sup>18</sup> T Saifullah, Teuku Yudi Afrizal, Potensi Radikalisme di Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Malikussaleh), *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/5980>

<sup>19</sup> *Ibid.*,

secara ketat atau radikal. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Schäfer berikut ini.

*“The term “Islam Nusantara” itself does not float in any non-political space, nor does it have only one meaning. It stands for a group of contemporary religious authorities who internally debate its exact meaning and externally take a stance against strict or “radical” interpretations of Islam, but it also stands for a set of values that can be traced back to the foundational vision of the Nahdlatul Ulama which has evolved since the early founding days.”*<sup>20</sup>

Dengan demikian, jika terdapat pendapat yang menyatakan bahwa IN adalah agama baru, sekte atau aliran baru, mengubah doktrin Islam di Indonesia adalah tidak benar.<sup>21</sup>

Tuduhan terhadap moderasi beragama sebagai bentuk lain dari JIL, liberalisme, sinkretisme, dan sekulerisme tentunya dikemukakan oleh pihak yang kontra terhadap program tersebut sehingga menyamakannya. Kemungkinan pendapat kontra tersebut didasarkan pada perdebatan kontroversial tahun 2005 sehingga MUI mengeluarkan fatwa pelarangan terhadap aliran-aliran seperti sekularisme, pluralisme, dan liberalisme sebagaimana dikemukakan oleh Schäfer berikut ini.

*“...Debates about plurality and pluralism are part of this. Words are rarely ever neutral, but the terms “plurality” and “pluralism” are particularly contested in post-Suharto Indonesia, partly because of the controversial debates that ensued after the 2005 MUI fatwa against “sekularisme”, pluralisme”, and “liberalisme.”*<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Saskia Schäfer. “Islam Nusantara –The Conceptual Vocabulary of Indonesian Diversity”, *Islam Nusantara*, Vol II, No. II, July 2021, <http://journal.unusia.ac.id/index.php/>

<sup>21</sup> Abd Moqsith, Tafsir atas Islam Nusantara (Dari Islamisasi Nusantara hingga Metodologi Islam Nusantara), *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 15, No. 2, 2016 <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/27/14>

<sup>22</sup> Ibid., Saskia Schäfer. “Islam Nusantara....”

Kelemahan dakwah moderasi beragama di YouTube terjadi dalam tataran ini. Tidak adanya reaksi dari para dai terhadap tuduhan-tuduhan dakwah moderasi beragama yang disampaikannya akan memengaruhi pemikirin *mad'u* yang lain. Perlu diluruskan dan ditanggapi bahwa moderasi beragama bukan produk Amerika, tetapi untuk mengimbangi konsep moderat Amerika yang dilandasi politik. Moderasi beragama di Indonesia tidak bersinggungan dengan politik, tetapi bertujuan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari radikalisasi Islam (deradikalisasi).<sup>23</sup>

Pada dasarnya berbeda pendapat bukan hal yang salah atau dilarang di negara yang mengutamakan demokrasi. Namun, berprinsip pada kemaslahatan umat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ketaatan kepada pemimpin bangsa menjadi sikap yang perlu dikedepankan. Perbedaan pendapat menjadi warna dalam kehidupan namun jangan dijadikan sebagai senjata untuk menuduh, mencaci atau menjelekkan orang atau kelompok yang tidak sepaham. Moderasi beragama merupakan program yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang damai di Indonesia. Untuk itu, bagi kelompok yang menolak atau tidak setuju terhadap program moderasi beragama tidak perlu memengaruhi pemikirannya terhadap kelompok lain yang tidak sejalan. Indonesia negara multikultural yang mengedepankan pemikiran moderat dalam beragama dan bernegara

Beberapa pernyataan di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk menentukan ideologi keagamaan para *mad'u* yang mengomentari dakwah moderasi

---

<sup>23</sup> Ahmad Najib Burhani, Al-Tawassut wa-l I'tidāl: The NU and Moderatism in Indonesian Islam, Asian Journal of Social Science, [https://brill.com/view/journals/ajss/40/5-6/article-p564\\_3.xml](https://brill.com/view/journals/ajss/40/5-6/article-p564_3.xml)

bergama di YouTube. Selain itu, bab IV subbab b tabel 4.13 merupakan temuan yang dihasilkan dari analisis dan deskripsi data pada subbab sebelumnya. Terdapat 3 kelompok besar ideologi keagamaan Islam yang secara epistemologi berbeda namun ontologinya sama yaitu Salafi/Wahabi, Syiah, dan Suni. Perbedaan cara berpikir tersebut yang menjadikan ketiga kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dalam beragama, berpolitik, dan bersosial. Moderasi beragama adalah cara pandang, bersikap secara moderat dalam beragama. Dengan cara berpikir yang berbeda maka ketiga kelompok ideologi keagamaan tersebut juga berbeda dalam menyikapi program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak 2019 tersebut.

Adapun ideologi keagamaan para *mad'u* dakwah moderasi bergama di YouTube diuraikan berikut ini.

### **1. Ahmadiyah**

*Mad'u* yang mengomentari dakwah moderasi beragama Aswaja di YouTube memiliki beberapa ideologi, salah satunya adalah ideologi Ahmadiyah. Hal tersebut menginformasikan bahwa kelompok Ahmadiyah menjadi *mad'u* dalam dakwah moderasi beragama Aswaja di YouTube. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok Ahmadiyah telah dinyatakan sebagai kelompok agama yang memiliki ideologi sesat, tetapi menjadi *mad'u* dakwah moderasi beragama Aswaja di YouTube yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim Syaifudin.



Berdasarkan pernyataan Pelana<sup>24</sup> disebutkan bahwa sebagai kelompok keagamaan di Indonesia gerakan Ahmadiyah sudah ada sejak 1925 dengan pertumbuhan yang pesat hingga memiliki kepengurusan dan pusat kegiatan Jemaat Jamiah Ahmadiyah di Parung Bogor pada 1987. Pada awal pergerakannya Ahmadiyah mendapat pengakuan secara legal sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia melalui SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 tertanggal 13-3-1953. Namun, dalam perkembangan selanjutnya Ahmadiyah dinyatakan sebagai ideologi sesat dan menyesatkan. Hal tersebut diputuskan melalui Munas VII MUI pada 2005 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam. Pelarangan terhadap kegiatan Jemaat Jamiah Ahmadiyah (JJA) tersebut karena terdapat konsep ideologi yang menyimpang dalam memandang relasi agama dan negara. Konsep tersebut berkaitan dengan kepemimpinan negara. Jemaat Jamiah Ahmadiyah memandang konsep yang tepat dalam kepemimpinan negara adalah *khilafah*.

Menurut Rahmatullah dan Istianah bahwa dalam pandangan JJA, *khilafah* merupakan bagian dari ideologi yang praktiknya tidak berbenturan dengan ideologi negara tempat mereka tinggal. Konsep tersebut bukan upaya mereka untuk mendirikan negara Islam atau sikap *defensive cultural response* terhadap perubahan tatanan politik, tetapi *khilafah* adalah sistem *ilahi (divine system)*,

---

<sup>24</sup> Zulkfli Paser Pelana, "Sejarah Ahmadiyah di Indonesia", [https://www.academia.edu/7859110/Sejarah\\_Ahmadiyah\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/7859110/Sejarah_Ahmadiyah_di_Indonesia).

sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An Nur: 56. Sistem tersebut mengatur dan mengoordinasikan aktivitas keagamaan jemaat dalam menjalankan mekanisme pemilihan dalam proses peralihan kepemimpinan yang diyakini sebagai bagian dari kesinambungan sistem kenabian. Dengan sistem tersebut, seorang *khalifah* memiliki otoritas mutlak pada domain agama, spiritualitas dan bukan pada ranah politik praktis atau sistem pemerintahan tertentu. Konsep *khilafah* tersebut terinternalisasi dalam diri setiap anggota JJA dan diaplikasikan dengan kesetiannya kepada khalifah melalui pelaksanaan semua program yang sudah ditetapkan. Dengan konsep tersebut solidaritas kolektif dan kesadaran sosial jemaat terbangun.<sup>25</sup> Berdasarkan pernyataan Rahmatullah dan Istianah tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan *mad'u* Ahmadiyah dalam mengomentari dakwah moderasi beragama didasarkan pada konsep ideologi *khilafah* yang dianutnya, yaitu otoritasnya pada domain agama dan spiritualitas bukan pada perubahan tatanan politik negara mereka tinggal. Untuk itu mereka tidak menentang kebijakan program moderasi beragama yang dibuat oleh pemerintah.

## 2. Syiah

Peneliti menyimpulkan terdapat *mad'u* berideologi Syiah dalam dakwah moderasi beragama berdasarkan temuan kosakata yang disampaikan dalam komentar. Meskipun *mad'u* Syiah tidak mengategorikan diri dalam kelompok berideologi tersebut secara eksplisit sebagaimana kelompok Ahmadiyah. Penyebutan kata “Syiah” berulang kali dalam komentar *mad'u* mengindikasikan

---

<sup>25</sup> Lutfi Rahmatullah, Istianah, “Jamaah Ahmadiyah: Ideologi dan Pola Keberagamaan di Tengah Kemajemukan”, *Dinika: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol 5, No 1 (2020) ISSN: 2503-4219 (p); 2503-4227 (e), [https://scholar.google.com/citations?user=8q\\_R3aoAAAAJ&hl=en&oi=sra](https://scholar.google.com/citations?user=8q_R3aoAAAAJ&hl=en&oi=sra)

keberadaannya dalam dakwah moderasi beragama. Selain itu terdapat pendayagunaan kosa “kafir” yang menjadi karakteristik kelompok Syiah yaitu mengafirkan (takfiri) kepada kelompok di luar kelompoknya.<sup>26</sup>

Meskipun tidak secara eksplisit *mad'u* yang berideologi Syiah menjadi komentator dalam dakwah moderasi beragama di YouTube, berdasarkan komentar-komentar yang ada dapat menjadi indikator keberadaannya. Terdapat beberapa komentar yang menolak konsep moderasi beragama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka “memborantak” terhadap kebijakan pemerintah dan cenderung berkonflik sebagai ciri khas kelompoknya. Komentar penolakan tersebut menganggap bahwa moderasi beragama merupakan kedok (topeng) proyek kelompok liberal dan sekuler. Ditambahkannya moderasi beragama juga membangun kepalsuan dan menyesatkan (*misleading*). Padahal, moderasi beragama dijadikan sebagai program pemerintah agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sikap penolakan terhadap program moderasi beragama oleh kelompok Syiah akan menimbulkan konflik antarumat beragama dan intern umat beragama Islam.

Sudah waktunya diluruskan dan dibenarkan dengan berbagai pendekatan atau program khusus mengembalikan sikap moderat masyarakat Indonesia sebagaimana usulan dalam komentar *mad'u*. Selain itu, *mad'u* juga menanyakan dan mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia agar memiliki program nyata untuk memoderatkan orang-orang Indonesia yang sekarang banyak berpaham fundamentalis dan alergi terhadap kata moderat. Hal tersebut sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Ahmad Pihar, Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, ““Pemikiran Teologi Klasik Khawarij dan Syiah”, *Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, Vol.1, Nomor 1, 2021. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir/article/view/84>

usulan Naim dan Badruzaman terkait dengan program moderasi beragama. Keduanya berpendapat bahwa pemahaman Islam moderat memerlukan bingkai pendukung dalam bentuk kebijakan yang dapat diinternalisasikan dalam pendidikan Islam.<sup>27</sup> Adapun pendapat peneliti dalam hal ini bahwa kebijakan tidak hanya diinternalisasikan dalam pendidikan Islam, melainkan pendidikan agama-agama yang ada di Indonesia karena agama-agama di Indonesia pun memiliki konsep sendiri tentang moderasi.

### 3. Salafi/Wahabi

Ideologi keagamaan keempat yang dianut oleh *mad'u* dakwah moderasi beragama di YouTube adalah Wahabi atau Salafi. Penyebutan Salafi atau Wahabi sebenarnya dapat menggunakan salah satunya karena pada dasarnya kedua istilah tersebut sama. Istilah Salafi digunakan oleh Iskandar dalam membahas teologi Islam bersamaan dengan teologi Islam lainnya yang kemunculannya setelah Rasulullah saw. wafat.<sup>28</sup> Adapun di Indonesia menurut Madali istilah Salafi populer sekitar 1995 pada saat diterbitkannya “Majalah Salafi” oleh Ja’far Umar Talib dan kawan-kawannya. Istilah Salafi tersebut dinisbatkan kepada golongan Wahabi.<sup>29</sup> Demikian pula pendapat Wiktorowicz yang menyebutkan bahwa gerakan Salafi disebut juga Wahabi.<sup>30</sup> Untuk itu, dalam penulisan disertasi ini

---

<sup>27</sup> Ngainun Naim, Abad Badruzaman, *Pesantren, Kampus Islam dan Moderasi Beragama*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2024), hlm.,138.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Mijaz Iskandar,

<sup>29</sup> Endang Madali, “Reformisme Hukum: Pengamalan Agama Perspektif Salafi Wahabi”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 1 Nomor 1 Januari 2021, DOI Issue : 10.46306/tj.v1i1, <http://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/8>

<sup>30</sup> Quintan Wiktorowicz, Anatomy of the Salafi Movement, *Studies in Conflict & Terrorism*, 29:207–239, 2006, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100500497004>

apabila secara bergantian menggunakan kedua istilah tersebut pada dasarnya bermaksud sama.

Alasan peneliti menempatkan ideologi Wahabi sebagai salah satu ideologi keagamaan *mad'u* dalam dakwah moderasi beragama karena dalam komentar-komentar *mad'u* tersebut menggunakan beberapa kosakata khusus sebagai ciri karakteristik kelompok tersebut. Penggunaan kosakata seperti kafir, kaffah, dan khilafah mencolok dalam komentar-komentar *mad'u* dakwah modarsi beragama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *mad'u* yang mendayagunakan kata-kata tersebut dalam berkomentar termasuk berideologi Wahabi.

Salah satu kelompok yang memerjuangkan ideologi *khilafah* adalah Salafi/Wahabi. Selain berideologi *khilafah*, kelompok Wahabi juga tidak mengakui pluralisme. Pengakuan bahwa kelompok Wahabi tidak mengakui pluralisme juga disampaikan oleh Wiktorowicz yang menyatakan bahwa kelompok tersebut tidak meyakini adanya pluralisme dalam Islam. Baginya tidak ada tafsir (interpretasi) dalam pemahaman al Quran dan as Sunah. Mereka menolak peran akal, logika dan keinginan manusia dalam memahami permasalahan kekinian. Hanya ada satu penafsiran yang sah dalam agama dengan keyakinan kebenaran tunggal yaitu mengikuti kepatuhan dengan ketat tentang konsep tauhid (Keesaan Tuhan). Selanjutnya dalam menerapkan konsep tersebut, mereka memberantas praktik- praktik agama yang menurutnya menyimpang dari ajaran Agama Islam (tidak sesuai dengan al Quran dan Sunah) dan memerangi kemusyrikan.<sup>31</sup> Dalam berbagai pernyataan konsep tersebut sering dinyatakan

---

<sup>31</sup> Ibid., Quintan Wiktorowicz, "Anatomy of the ....

dengan jargon “kembali kepada al Quran dan Sunah/Hadis”,”pemahaman *salafus salih*”.

Selain menyatakan bahwa Wahabi tidak mengakui pluralisme, Wiktorowicz juga membagi adanya tiga faksi dalam paham Wahabi yaitu, puritan, politikus, dan jihadis. Selanjutnya Wiktorowicz menjelaskan bahwa puritan merupakan kelompok yang bergerak menjaga kemurnian Islam yang tertuang dalam al Quran dan Hadis serta memberantas praktik-praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah saw.<sup>32</sup> Dalam komentar para *mad'u* yang berideologi Wahabi menyebutkan bahwa moderasi beragama merupakan praktik agama yang menyimpang. Oleh karena itu mereka tidak menyetujui konsep moderasi beragama yang disampaikan oleh para dai di YouTube.

Faksi kedua Salafi memasuki dunia politik/kekuasaan dengan gerakannya yang sistematis di beberapa negara yang penduduknya mayoritas muslim yang pada akhirnya menjadikan Wahabi sebagai ideologi politik juga.<sup>33</sup> Pada faksi kedua inilah *mad'u* dalam dakwah moderasi beragama memainkan perannya. Penyerangannya terhadap kelompok lain yang tidak sepaham dengan kelompoknya disampaikan secara politis. Melalui penolakan terhadap konsep moderasi beragama mereka berusaha memengaruhi *mad'u* yang lain untuk mendirikan negara khilafah. Di Indonesia organisasi massa berideologi Wahabi yang memerjuangkan berdirinya negara khilafah adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perjuangan mereka untuk mendirikan negara khilafah dilakukan secara politis dan jihadis melalui ranah dakwah dan aksi nyata. Meskipun HTI telah

<sup>32</sup> Ibid.,

<sup>33</sup> Imam Hendriyadi Syarqawi, “Wahabisme: Gerakan Revivalist Islam”, Jurnal: *Tafhim-Al-Ilmi*, Februari 2020, 324-333, <https://jurnal.stitau.ac.id/index.php/tafhim/article/download/51/51>

dibubarkan, ideologi *khilafah* dan doktrin-doktrinnya masih tumbuh subur di Indonesia sebagaimana komentar-komentar para *mad'u* dalam dakwah moderasi beragama di YouTube. Dengan demikian, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tidak boleh berhenti dalam mengantisipasi gerakan ideologi Wahabi di negeri ini.

Adapun Faksi jihadis lebih mengarah pada tindakan radikal/kekerasan yang ditujukan kepada orang lain yang bukan kelompok mereka atau tidak sepaham dengan mereka meskipun sesama muslim. Tindakan mereka diwujudkan dalam aksi pengeboman dan pembunuhan.<sup>34</sup> Pernyataan *mad'u* yang mengarah pada faksi ketiga ini dinyatakan secara implisit pada komentarnya dengan menyebut tokoh FPI (Front Pembela Islam) Habib Riziq. Ada pula pernyataan yang meminta agar pelaku pengeboman dihukum mati. Dengan demikian, ruang digital menjadi sarana memudahkan kelompok Wahabi menyampaikan ide-idenya, mengajarkan ideologinya dengan lebih leluasa tanpa harus melakukan gerakan nyata.

#### **4. Suni**

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab sebelumnya bahwa terdapat 3 kelompok ideologi keagamaan Islam yang menjadi *mad'u* dakwah moderasi beragama di YouTube, yaitu Ahmadiyah, Syiah, dan Wahabi. Meskipun tidak secara eksplisit terdapat komentar yang menyatakan persetujuan tentang program moderasi beragama, kelompok Ahmadiyah menyatakan kehadirannya dalam

---

<sup>34</sup> Zulkarnain Haron, Nordin Hussin, "Islam di Malaysia: Penilaian semula fahaman salafi jihadi dan interpretasi jihad oleh Al Jama'ah Al Islamiyah", GEOGRAFIA OnlineTM Malaysia Journal of Society and Space 9 issue 1 (126 - 137) 126 ©2013, ISSN 2180-2491, [https://www.academia.edu/download/52604262/14.geografia-jan\\_2013-nordin-edam126-137.pdf](https://www.academia.edu/download/52604262/14.geografia-jan_2013-nordin-edam126-137.pdf)

komentar dakwah moderasi agama Aswaja di YouTube yang disampaikan oleh dai 1. Selain itu pernyataannya yang mengapresiasi kehadiran dai 1 di kegiatan jamaahnya menunjukkan bahwa Ahmadiyah bukan menolak konsep moderasi beragama. Demikian pula kelompok yang berideologi Syiah.

Walaupun kelompok berideologi Syiah tidak secara eksplisit berkomentar dalam dakwah moderasi beragama Aswaja di YouTube, mereka memiliki satu ciri yang sama dengan kelompok ideologi Wahabi, yaitu sikap *takfiri*. Selain itu, terdapat *mad'u* yang menyebut atau menggunakan nama ideologi tersebut. Kedua kelompok ideologi keagamaan ini (Wahabi dan Syiah) menolak konsep moderasi agama Aswaja dengan berbagai argumen sebagaimana sudah disampaikan dalam subbab sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana pendapat Khoirunnissa yang menyatakan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki kesamaan pola pikir.<sup>35</sup>

Program Moderasi beragama yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menerapkan cara/metode berpikir kelompok Suni sebagaimana disampaikan oleh Iskandar yang mengutip pendapat Siradj, yaitu *tawasut, tawazun, ta'adul, tasamuh*.<sup>36</sup> Kosakata-kosakata tersebut digunakan oleh beberapa *mad'u* untuk mengomentari dakwah moderasi beragama di YouTube. Kosakata yang sering digunakan adalah *wasathiyah* sebagaimana pembahasan sikap moderat. Dalam bahasa Arab, kosa kata *al-wasathiyah* terdapat dalam

---

<sup>35</sup> Rahma Khoirunnissa, "Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa", Jurnal *Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 10, No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1276>, <https://riset.iaid.net/index.php/jppi/article/view/1276>

<sup>36</sup> *Ibid.*, Mijaz Iskandar,



QS.al Baqarah (2): 143, al-*wasath* ‘terbaik dan paling sempurna’.<sup>37</sup> Kosakata *wasathiyah* merujuk pada pengamalan agama Islam oleh pemeluknya sehingga dikenal dengan istilah *Islam wasathiyah* atau Islam moderat. Dengan istilah tersebut dapat dimaknai sebagai Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, toleran, cinta kedamaian, menjaga nilai luhur yang baik, dan menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan.<sup>38</sup> Dengan demikian, moderasi beragama sejalan dengan *manhaj* Suni sehingga umat Islam di Indonesia yang berideologi Suni sebagian besar dapat menerima konsep moderasi beragama sebagai program pemerintah dalam menjalankan ajaran agamanya.

Program moderasi beragama di Indonesia yang telah dijalankan 5 tahun, setidaknya keberhasilan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat melalui indikator tertentu, misalnya berkurangi atau tidak ada lagi sikap-sikap beragama yang ekstrim; sikap toleransi meningkat; dan sebagainya. Sebagai program pemerintah, moderasi beragama adalah sikap beragama yang layak bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan dan mengamalkannya. Dengan mencermati komentar para *mad'u* terhadap dakwah moderasi beragama di YouTube, beberapa perspektif *mad'u* tentang moderasi beragama menunjukkan berbagai pemahaman yang berbeda. Apalagi keberagaman identitas sosial dan ideologi keagamaan yang dianut para *mad'u* dapat membuka dan menambah pandangan mereka tentang moderasi beragama. Umat Islam di Indonesia yang berideologi Suni

---

<sup>37</sup> Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia”, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret 2019, <https://kua-bali.id/storage/app/uploads/public/619/606/004/6196060044dd0744554085.pdf>

<sup>38</sup> Mustaqim Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa”, *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2021. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/104>

menjadi penguat dan pengimplemetasi moderasi beragama di Indonesia. Mereka harus dapat bertahan dan terus berjuang menanamkan ideologinya secara benar agar dapat menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia.

**C. Relasi Kuasa antara Identitas Sosial dan Identitas Keagamaan  
*Mad'u* terhadap Dakwah Moderasi Beragama di YouTube**

Komentar dalam dakwah moderasi beragama di YouTube bukan sekadar piranti linguistik yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran para *mad'u*. Dalam pandangan AWK bahwa ide, gagasan, pemikiran yang disampaikan dalam bentuk visual (tulisan, gambar, tindakan) dapat dikaji latar belakang sosial, budaya, politik, ideologi dibalik teks yang dihasilkan oleh penghasil teks. Di samping itu, kajian akan memunculkan pertarungan kuasa antara ordinat dengan subordinat yang berakibat pada determinan dan dampak di antara keduanya. Pertarungan kuasa dalam dakwah moderasi beragama di YouTube menghasilkan 2 sub-subbab berikut ini.

**1. Relasi kuasa  
penolakan konsep dakwah moderasi beragama**

Penolakan terhadap konsep moderasi beragama berkaitan erat dengan identitas sosial dan identitas ideologi kegamaan *mad'u*. Dengan latar belakang perbedaan agama, jenis kelamin, status sosial, dan asal *mad'u* dapat melahirkan relasi kuasa. Demikian pula identitas ideologi kegamaan para *mad'u* sehingga terjadi pertarungan relasi kuasa antar *mad'u*. Pertarungan kuasa lebih didominasi oleh para *mad'u* beridentitas sosial agama Islam dan berideologi Suni dan Wahabi.

Komentar-komentar *mad'u* terhadap dakwah moderasi beragama kalau ditinjau secara kuantitas tidak ada dominasi, tetapi secara kualitas terjadi dominasi. Baik *mad'u* yang sebagian beragama Islam maupun selain Islam menyetujui konsep moderasi beragama yang disampaikan oleh para dai. Namun terdapat pula *mad'u* yang beragama Islam yang menolak konsep moderasi beragama. Ketika terjadi penolakan konsep moderasi beragama oleh *mad'u* yang beragama Islam dengan berbagai argumen, *mad'u* beragama Islam yang menyetujui konsep moderasi beragama lebih banyak tidak menanggapi bahkan mengalihkan ke pembahasan lain. Hal tersebut mengesankan bahwa *mad'u* beragama Islam yang menolak moderasi beragama lebih berkuasa atas penolakannya.

Dasar penolakan atas konsep moderasi beragama dengan cara membandingkan dan menstigma bahwa moderasi beragama bukan salah satu ajaran Islam yang kaffah menjadi benar manakala disertai fakta-fakta. Penolakan terhadap moderasi beragama tersebut bertujuan untuk membersihkan tuduhan radikal kepada kelompok Wahabi yang tidak sepaham dengannya. Mengalihkan isu dengan menyebutkan moderasi beragama bukan berakar dari kehidupan masyarakat Islam Indonesia<sup>39</sup>, tetapi produk asing menjadi senjata kelompok di luar Suni untuk memengaruhi pemikiran *mad'u* yang lain. Ideologi yang digunakan oleh kelompok Wahabi dilandasi dengan kepentingan sosial dan politik untuk mendirikan ideologi khilafah di Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid., Ngainun Naim, Abad Badruzaman, *Pesantren, Kampus Islam....*, hlm. 4

<sup>40</sup> M. Taufiq Rahman, *Islam sebagai Ideologi Gerakan*, <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/21998>.

Selain itu, dominasi kuasa atas penolakan terhadap konsep moderasi beragama oleh *mad'u* yang beragama Islam dan berideologi Wahabi dilakukan dengan cara melabeli moderasi beragama dengan JIL, IN, Liberalisme dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka bersifat eksklusif dan enggan menerima pendapat di luar kelompoknya.<sup>41</sup> Dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya, kelompok Wahabi melakukannya secara defensif (bertahan dengan pendapatnya, tidak menerima pendapat di luar kelompoknya).<sup>42</sup> Dengan demikian, relasi kuasa terhadap dakwah moderasi beragama bukan karena subordinasi, melainkan pernyataan penolakan yang dikuasai oleh *mad'u* yang beragama Islam dan berideologi Wahabi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam relasi kuasa dalam AWK tidak berlaku dalam dakwah moderasi beragama karena relasi kuasa dalam AWK terjadi antara ordinat dan subordinat. Adapun dalam dakwah moderasi beragama ini yang terjadi antara sesama *mad'u* yang memiliki kedudukan sama (egaliter).

Selain berdasarkan identitas agama, penolakan terhadap konsep moderasi beragama juga berdasarkan identitas sosial lainnya yaitu jenis kelamin dan status sosial. Berdasarkan jenis kelamin dan status sosial tidak ada dominasi dalam hal penolakan terhadap konsep moderasi beragama. *Mad'u* laki-laki dan perempuan sebanding dalam melakukan penolakan terhadap konsep moderasi beragama. Demikian pula dengan status sosial *mad'u* namun terdapat *mad'u* yang berstatus sosial ASN yang menolak konsep moderasi beragama. Hal tersebut bukan

---

<sup>41</sup> Asep Mulyaden, "Ideologi Islam Tradisionalis dalam Tafsir", Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 188, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11898>

<sup>42</sup> Zuly Qodir, "Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia", Islamica, Vol. 3, No. 1, September 2008, <https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/39/277>

menjadi fenomena baru karena fakta menunjukkan bahwa ASN di Indonesia banyak yang terpapar radikalisme.<sup>43</sup> Hal ini menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan yang telah meluncurkan program di bawah *leading sector* pemerintah. Moderasi beragama dengan semua bentuk kegiatannya perlu dievaluasi karena program yang tidak dievaluasi akan kehilangan spirit progresifnya sehingga terkesan asal dilaksanakan tanpa memedulikan apakah program tersebut sukses atau tidak.<sup>44</sup>

## 2. **Efek dakwah moderasi beragama**

Selain membongkar dominasi atau kuasa, AWK juga mengkaji dampak wacana yang dihasilkan oleh penghasil teks. Penghasil teks dalam hal ini para *mad'u* yang mengomentari dakwah moderasi beragama di YouTube. Para *mad'u* memberi reaksi terhadap materi dakwah moderasi beragama. Reaksi tersebut disampaikan dalam bentuk ekspresi positif dan negatif. Baik ekspresi positif maupun negatif yang disampaikan oleh para *mad'u* berkaitan dengan tema materi kecuali beberapa ekspresi yang keluar dari materi moderasi beragama.

Ekspresi positif berisi tentang pujian para *mad'u* kepada para dai penyampai materi dakwah moderasi beragama. Semua dai dalam dakwah moderasi beragama mendapat pujian dari para *mad'u*. Pujian tersebut terkait dengan materi yang disampaikan, cara penyampaiannya, dan kepiawaian ilmunya. Sebagaimana disebutkan dalam teori tindak tutur Searle bahwa ekspresi positif merupakan salah satu dari tindak tutur untuk menyampaikan penghargaan atau

<sup>43</sup> Ibid., M. Taufiq Rahman, Islam sebagai Ideologi...

<sup>44</sup> Ibid., <sup>44</sup> Ibid., Ngainun Naim, Abad Badruzaman, *Pesantren, Kampus Islam...*, hlm. 146.

keaguman dan sekaligus evaluasi.<sup>45</sup> Selain itu, ekspresi positif dimaksudkan untuk menjaga kesopanan dan strategi untuk membangun hubungan sosial. Para *mad'u* yang menyampaikan ekspresi positif terhadap para dai menggunakan konteks kesopanan dan berusaha membangun hubungan dengan para dai.

Selain efek positif dalam bentuk tindak tutur ekspresif, terdapat beberapa *mad'u* yang menyampaikan ekspresi negatif. Ekspresi tersebut ada yang sesuai dengan tema ada pula yang keluar dari tema moderasi beragama. Ekspresi negatif para *mad'u* disampaikan dalam bentuk kemarahan, kekecewaan, dan ketidaksetujuan. Dalam pragmatik, ekspresi negatif juga termasuk dalam tindak tutur ekspresif. Efek negatif yang muncul dalam ekspresi negatif yaitu tidak berkaitan dengan materi dakwah moderasi beragama. Efek negatif tersebut ditimbulkan oleh latar belakang pribadi atau keluarga dai.

Didasarkan pada pendapat Searle tentang tindak tutur, efek negatif yang disampaikan kepada dai merupakan tindak tutur direktif. Dalam tindak tutur tersebut, *mad'u* menyarankan kepada dai untuk bertobat karena dakwah yang disampaikan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam tindak tutur tersebut, *mad'u* melanggar konteks kesopanan karena melarang dai berdakwah karena anggota keluarganya tidak menjalankan ajaran Islam secara kaffah. Efek negatif lain disampaikan oleh *mad'u* kepada dai dengan cara melabelinya sebagai menteri yang tidak ada dalam kenyataan di kementerian. Tindakan ini termasuk dalam tindak tutur representatif atau asertif.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Rizki Dian Safitri dkk., Teori Tindak Tutur dalam Studi Pragmatik, Jurnal Kabastra, Vol. 1, No. 1, Desember 2021, p. 59-67. Diakses 8 Juli 2023, 2.36 WIB. <https://journal.untidar.ac.id/index.php/kabastra/article/download/7/5/2020>

<sup>46</sup>Ibid., Rizki Dian Safitri dkk., Teori Tindak Tutur...

## D. **Proposisi**

Proposisi dalam penelitian ini disampaikan berdasarkan temuan-temuan yang telah didapatkan dari dakwah moderasi beragama di YouTube.

### Proposisi I

1. Jika semua agama di  
Indonesia menerima konsep moderasi beragama secara benar maka tidak ada warga Indonesia yang menganggap praktik keagamaannya paling benar sehingga kehidupan keberagaman di Indonesia akan adil dan seimbang.
2. Jika jenis kelamin,  
status sosial dan asal *mad'u* berkaitan erat dengan agama yang dianut *mad'u* maka semua agama di Indonesia lebih mudah mengarahkan pengikutnya untuk menjalankan praktik keagamaannya secara moderat sehingga dapat menciptakan kehidupan keberagaman yang kondusif.
3. Jika dakwah  
moderasi beragama hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang beridentitas sosial menengah ke atas maka masyarakat yang berada pada akar rumput tidak akan mengenalnya meskipun praktik keagamaan yang moderat telah dijalankannya.

### Proposisi II

1. Jika perbedaan  
ideologi keagamaan menjadi alasan menolak program moderasi beragama

maka ideologi tersebut harus dihambat atau dilarang di Indonesia agar tidak memengaruhi dan menyebarkan ideologi tersebut.

2. Jika ideologi radikal menguasai ruang digital dakwah moderasi beragama maka harus diimbangi dan ditambah frekuensi dakwah digital moderasi beragama agar dakwah di ruang digital dapat menghambat ruang gerak radikalisasi.

### Proposisi III

1. Jika komentar *mad'u* terhadap dakwah moderasi beragama di YouTube didominasi oleh penolakan maka tujuan program moderasi beragama di Indonesia sulit ditentukan keberhasilannya sehingga kehidupan keberagamaan di Indonesia yang moderat sulit diwujudkan.
2. Jika *mad'u* berideologi Wahabi mendominasi dakwah di media digital maka mereka sangat mudah memengaruhi dan menyebarkan pahamnya sehingga radikalisasi akan semakin subur di Indonesia.
3. Jika dakwah moderasi beragama di YouTube berefek positif bagi para *mad'u* maka penyampaian komentar oleh para *mad'u* didasari oleh ekspresi positif sehingga *mad'u* mampu membangun relasi sosial dan kesantunan dengan dai.
4. Jika dakwah moderasi beragama di YouTube berefek negatif bagi para *mad'u* maka



penyampaikan komentar oleh para *mad'u* didasari oleh ekspresi negatif sehingga *mad'u* melanggar konteks kesopanan kepada dai.